DAFTAR ISI

Selayang Pandang Tentang Isi Buku _ vii

Kata Pengantar _ xix

Daftar Isi _ xxi

Kriminalisasi Kebijakan _ 1

- A. Pendahuluan _ 1
- B. Kebijakan Publik _ 4
- C. Perlindungan Hukum _ 6
- D. Penutup _ 10

Wacana Konsep Hukum Progresif

Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia _ 13

Abstrak _ 13

- A. Pendahuluan _ 14
- B. Konsep Hukum Progresif _ 19
- C. Wacana Penegakkan Hukum Responsif di Indonesia _ 23
- D. Penutup _ 28

Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi _ 31

Abstrak _ 31

- A. Pendahuluan _ 32
- B. Ruang Lingkup Korporasi Menurut Hukum Pidana _ 33
 - 1. Pengertian Korporasi _ 33
 - 2. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana _ 36
- C. Perkembangan Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi _ 38
 - a. Negara Eropa Kontinental _ 38
 - b. Negara Anglo Saxon (Amerika, Inggris, dan Australia) _ 41
- D. Model Jenis-Jenis dan Reformasi Sanksi Pidana untuk Korporasi _ 45
 - 1. Model Jenis-jenis Sanksi Pidana Korporasi _ 45
 - 2. Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi _ 45
- E. Penutup _ 47

Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Menilai Gratifikasi Berdasarkan Hukum dan Kebijakan _ 49

- A. Pendahuluan _ 49
- B. Batasan dan Pengertian Gratifikasi Dikaitkan dengan Istilah Lainnya _ 50
- C. Aturan dan Prosedur Gratifikasi _ 52
- D. Penutup _ 57

Kebijakan Legislasi Tentang Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah _ 59

- A. Pendahuluan _ 59
- B. Latar Belakang Lahirnya Beban Pembuktian Terbalik _ 63
- C. Kebijakan Legislasi dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik _ 67
- D. Implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi _ 73
 - 1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kasus Penyipuan _ 77
 - 2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kasus Perampasan Harta Benda Terdakwa _ 78
- E. Penutup _ 83

Kajian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Aspek Hukum Perdata Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia _ 87

- Abstrak _ 87
- A. Pendahuluan _ 88
 - B. Upaya Memberantas Korupsi di Indonesia Melalui Pembaharuan Hukum Pidana Positif dalam Mencegah Timbulnya Kerugian Negara _ 89
 - C. Aspek Perdata Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Para Obligatior BLBI dalam Usaha Menciptakan Rasa Keadilan Masyarakat _ 92
 - D. Kendala Hukum yang Menyebabkan Berlarut-Larutnya Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus BLBI _ 98
 - E. Penutup _ 99

Peran Kriminologi Dalam Menetapkan Kebijakan Kriminalisasi Dalam (Kebijakan) Hukum Pidana _ 103

- A. Pendahuluan _ 103
- B. Hubungan Kriminologi dengan (Ilmu) Hukum Pidana _ 105
- C. Peranan Kriminologi dalam Menetapkan Kebijakan Kriminalisasi _ 109
 - 1. Penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai langkah kardinal dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. _ 112
 - 2. Kriteria Penetapan Kebijakan Kriminalisasi _ 116

D. Permasalahan Kriminologikal dalam Penetapan Kebijakan Kriminalisasi _ 119

E. Penutup _ 124

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia _ 129

Abstrak _ 129

A. Pendahuluan _ 130

B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia _ 134

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia _ 138

D. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang _ 140

E. Penutup _ 150

Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi _ 155

Abstrak _ 155

A. Pendahuluan _ 156

B. Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Konteks Negara Hukum _ 158

C. Implementasi Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi _ 168

D. Penutup _ 170

Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia _ 177

Abstrak _ 177

A. Pendahuluan _ 178

B. Penyanderaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) _ 182

C. Mekanisme Penyanderaan Penanggung Pajak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perpajakannya _ 190

D. Upaya Hukum Penanggung Pajak Terhadap Penyanderaan _ 194

E. Penutup _ 195

Transparansi Penyidikan Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri _ 199

A. Pendahuluan _ 199

B. Transparansi Penyidikan yang Dilakukan Kepolisian _ 205

C. Penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana _ 217

D. Penutup _ 222

Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Prespektif Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat _ 227

Abstrak _ 227

A. Pendahuluan _ 228

B. Kebijakan Legislasi Tentang Pidana Pemilu _ 229

C. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat _ 234

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia _ 237

E. Penutup _ 244

Aspek-aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Didahului Pelanggaran Hukum Pidana Pekerja/Buruh Dalam Cita Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Kajian Terhadap Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) _ 247

Abstrak _ 247

Pendahuluan _ 248

B. Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan _ 249

C. Aspek-Aspek Hukum Ketenagakerjaan _ 256

D. Pelanggaran Hukum Pidana Pekerja/Buruh dalam Cita Hukum Ketenagakerjaan Indonesia _ 263

E. Penutup _ 267

Kebijakan Kriminal dan Pembaruan Hukum Pidana Anak _ 271

A. Pendahuluan _ 271

B. Pengertian Tindak Pidana dan Kenakalan Anak _ 276

1. Pengertian Tindak Pidana _ 276

2. Istilah dan Pengertian Kenakalan Anak _ 281

3. Faktor- Faktor Terjadinya Kenakalan Anak _ 284

C. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak _ 294

1. Instrumen Internasional Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Anak _ 294

2. Hak-Hak Anak dalam Bidang Penyidikan dan Penuntutan _ 301

3. Hak-Hak Anak dalam Hal Penahanan Sementara _ 303

4. Hak-Hak Anak dalam Pemeriksaan Pengadilan dan Putusan Hakim _ 304

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Positif _ 307

a. Masalah Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak _ 312

b. Masalah Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana _ 315

E. Penutup _ 318

Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional _ 321

A. Pendahuluan _ 321

B. Eksistensi Hakikat dalam Hukum Pidana Islam _ 326

- C. Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional _ 327
 - 1. Manusia Sebagai Subjek Hukum Pidana _ 327
 - 2. Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pancasila _ 328
 - 3. Tranformasi Hukum Pidana Islam dalam RUU KUHP Nasional _ 335
- D. Reaktualisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional _ 337
- E. Penutup _ 339

Profil Penulis _ 343